

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-sama guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi. Menurut Dewi dan Sutrisna (2014:32), menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Akudugu,2012).

Kesejahteraan masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia yang kemudian diatur oleh UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah maupun masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam melihat dan mengamati perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keberhasilan perkembangan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dapat diukur melalui nilai IPM atau *Human Development Indeks* (HDI). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai gambaran untuk mengamati tingkat kesejahteraan dalam bentuk satu satuan indeks kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah naik 0,6 poin menjadi 71,12 pada 2018 kemarin. Sebelumnya, IPM Jateng tercatat 70,52 poin. Capaian IPM ini termasuk tinggi sejak 2017. Yakni melebihi 70 poin. Periode 2010-2016, IPM Jateng masih tergolong rendah atau berkutat di angka 60-an. IPM Jawa Tengah terhitung unggul dibanding Jawa Timur yang sebesar 70,77. Bahkan IPM Jateng nyaris setara level nasional, yakni 71,39 poin. Anak-anak usia 7 tahun di Jateng memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,63 tahun pada 2018. Atau naik 0,06 tahun ketimbang 2017. Sementara penduduk usia 25 tahun ke atas, secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,35 tahun atau pada jenjang SMP kelas 1. Naik 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 10,78 juta pada 2018. Meningkat Rp 400 ribu dibandingkan tahun sebelumnya (JawaPos.com, 2019). Berikut merupakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018**

Kabupaten/Kota Provinsi	2016	2017	2018
Kabupaten Cilacap	68.60	68.90	69.56
Kabupaten Banyumas	70.49	70.75	71.30
Kabupaten Purbalingga	67.48	67.72	68.41
Kabupaten Banjarnegara	65.52	65.86	66.54
Kabupaten Kebumen	67.41	68.29	68.80
Kabupaten Purworejo	70.66	71.31	71.87
Kabupaten Wonosobo	66.19	66.89	67.81
Kabupaten Magelang	67.85	68.39	69.11
Kabupaten Boyolali	72.18	72.64	73.22
Kabupaten Klaten	73.97	74.25	74.79
Kabupaten Sukoharjo	75.06	75.56	76.07
Kabupaten Wonogiri	68.23	68.66	69.37
Kabupaten Karanganyar	74.90	75.22	75.54
Kabupaten Sragen	71.43	72.40	72.96
Kabupaten Grobogan	68.52	68.87	69.32
Kabupaten Blora	66.61	67.52	67.95
Kabupaten Rembang	68.60	68.95	69.46
Kabupaten Pati	69.03	70.12	70.71
Kabupaten Kudus	72.94	73.84	74.58
Kabupaten Jepara	70.25	70.79	71.38
Kabupaten Demak	70.10	70.41	71.26
Kabupaten Semarang	72.40	73.20	73.61
Kabupaten Temanggung	67.60	68.34	68.83
Kabupaten Kendal	70.11	70.62	71.28
Kabupaten Batang	66.38	67.35	67.86
Kabupaten Pekalongan	67.71	68.40	68.97
Kabupaten Pemalang	64.17	65.04	65.67
Kabupaten Tegal	65.84	66.44	67.33
Kabupaten Brebes	63.98	64.86	65.68
Kota Magelang	77.16	77.84	78.31
Kota Surakarta	80.76	80.85	81.46
Kota Salatiga	81.14	81.68	82.41
Kota Semarang	81.19	82.01	82.72
Kota Pekalongan	73.32	73.77	74.24
Kota Tegal	73.55	73.95	74.44
Provinsi Jawa Tengah	69.98	70.52	71.12

Sumber : BPS Jawa Tengah

Nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari angka 69.98 di tahun 2016 hingga 71.12 di tahun 2018. Tabel 1 menunjukkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016 – 2018. Namun, IPM di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terjadi ketimpangan dan mengalami pergeseran urutan selama tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 urutan pertama IPM dimiliki oleh Kota Semarang 81.19, kemudian disusul oleh Kota Salatiga 81.14, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Brebes 63.98. Pada tahun 2018 secara keseluruhan IPM kabupaten/kota mengalami peningkatan yang disertai dengan perubahan ranking. Kota Semarang pada tahun 2018 masih tetap pada urutan pertama 82.72, kemudian disusul oleh Kota Salatiga, 82.41 dan yang paling terbawah masih dimiliki oleh Kabupaten Pemasang 65.67. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010: 108).

Berdasarkan teori akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk

mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka. Menurut Lembaga Keuangan Negara (LAN,2003) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi

kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Pembiayaan penyelenggaraan desentralisasi berasal dari pendapatan daerah yang didapat dari penjarangan pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang disebut dana perimbangan, dimana dana perimbangan ini berfungsi untuk membiayai kebutuhan suatu daerah. Selain itu dana perimbangan juga bermanfaat dalam mengurangi kesenjangan fiskal antara hubungan vertikal antar daerah dan pusat, serta hubungan horizontal antar daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil. Kuncoro (2004:1) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu sumber dana yang penting dalam mempengaruhi perekonomian regional. Sama halnya seperti pendapatan

daerah lainnya, dana perimbangan digunakan untuk mendanai proses pembangunan daerah melalui belanja langsung dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan menciptakan kesejahteraan di seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan disuatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih ke masyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia (Ranis, 2004). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan terjadinya peningkatan pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya

alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya kesenjangan/disparitas antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan.

Arini (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. Hasil penelitian menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Jayastra,dkk (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk,Dana Perimbangan,dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. Penelitian menunjukkan bahwa Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Jember dan Anak (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Perimbangan Yang Dimoderasi Belanja Langsung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Awandari dan Indrajaya (2016) Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Infrastruktur,Investasi,dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. Wijayanti dan Darsana (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013). Hasil Penelitian menyatakan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Yasa dan Arka (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Santusa (2019) yang meneliti Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Alasan mengapa mereplikasi Anggit Santusa (2019) Dengan adanya perbedaan Indeks pembangunan manusia pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016 dengan indeks pembangunan manusia 69,98% (BPS) sedangkan pada tahun 2017-2018 dengan indeks pembangunan manusia 71,12% (BPS). Penelitian termotivasi untuk seberapa besar belanja modal, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap

kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2016-2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Tahun penelitian dan mengganti variabel kinerja keuangan menjadi variabel Belanja Modal. Alasan mengapa mengganti menjadi variabel Belanja Modal adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 35 Kabupaten/Kota. Dalam penelitian lain menemukan hasil Belanja Modal dalam penelitian Arini (2016) Hasil Penelitian menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya :

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

4. Apakah Disparitas Pendapatan antardaerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- d. Untuk menemukan bukti empiris bahwa Disparitas Pendapatan antar daerah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait teori belanja modal, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

b. Bagi Akademik

Memberikan wawasan, pengetahuan, referensi tambahan dan memberikan bukti empiris untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai bahan acuan, petunjuk maupun masukan dalam membuat kebijakan sehingga dapat mengembangkan perekonomian.

